RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI
DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, Menteri selaku Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak berwenang mengatur besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2021 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 202X tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202X Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 970);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 Tahun 2021 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada

Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1331);

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
4. Instansi Pemungut PNBPN atau Instansi Pengelola PNBPN adalah Unit Kerja atau Satuan Kerja di lingkungan

Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melakukan pemungutan/pengelolaan PNBP.

5. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang selanjutnya disebut Ditjen SDPPI adalah unit satuan kerja di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi perangkat pos dan informatika.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Instansi Pemungut PNBP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian.
7. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik.
8. Mahasiswa Kurang Mampu adalah mahasiswa dari keluarga kurang mampu dari aspek keuangan.
9. Mahasiswa yang Terkena Bencana adalah Mahasiswa yang tidak dapat membiayai pendidikannya dikarenakan pihak yang membiayai terkena bencana.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Pembinaan Pendidikan Tetap yang selanjutnya disebut SPP Tetap adalah biaya pembinaan pendidikan per semester yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pembinaan Pendidikan Variabel yang selanjutnya disebut SPP Variabel adalah biaya pembinaan pendidikan per Satuan Kredit Semester yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pengembangan Akademik yang selanjutnya disebut SPA adalah biaya yang dikenakan kepada mahasiswa untuk pengembangan akademik.

14. Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi tertentu.
15. Pelatihan Fungsional adalah Pelatihan yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang tugas yang terkait dengan jabatan fungsional PNS, agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
16. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG DIKENAKAN TARIF SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN

Pasal 2

- (1) Terhadap jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan pertimbangan tertentu dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. penggunaan spektrum frekuensi radio;
 - b. penerbitan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi;
 - c. pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi;
 - d. penyelenggaraan pelatihan fungsional;
 - e. penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - f. penyelenggaraan pelatihan;
 - g. penyelenggaraan uji kompetensi; dan

- h. penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Jenis PNBP Penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, berupa Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio.
- (2) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, e, f, dan g terdiri atas:
- a. Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional yang meliputi Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
 - b. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang meliputi:
 - 1) Pembinaan Pendidikan Tetap; dan
 - 2) Pembinaan Pendidikan Variabel.
 - c. Penyelenggaraan Pelatihan tingkat Dasar, Menengah, Mahir dan Non-Tingkat yang meliputi:
 - 1) Pelatihan Bidang TIK;
 - 2) Pelatihan Bidang Informatika;
 - 3) Pelatihan Bidang Komunikasi; dan
 - 4) Pelatihan Bidang Telekomunikasi.
 - d. Penyelenggaraan Uji Kompetensi, terdiri atas:
 - 1) Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tingkat 1;
 - 2) Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tingkat 2;
 - 3) Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tingkat 3;
 - 4) Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tingkat 4;
 - 5) Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tingkat 5;
 - 6) Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tingkat 6; dan
 - 7) Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tingkat 7.
- (3) Jenis PNBP penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf h, yang terdapat pada Instansi Pemungut PNBP/Instansi Pengelola PNBP.

BAB III
BESARAN DAN PERSYARATAN PENGENAAN TARIF
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN
NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN

Bagian Kesatu
Besaran Tarif

Pasal 4

Besaran tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Rp0,00 (nol rupiah) atau 0,00% (nol persen); dan
- b. 50% (lima puluh persen)

Bagian Kedua
Persyaratan Pengenaan Tarif

Pasal 5

- (1) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0,00% (nol persen) atas jenis PNBPN dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) poin a, b, dan c dikenakan untuk penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (2) Tarif PNBPN sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 0,00% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila permohonan diajukan oleh unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, kecuali Badan Layanan Umum (BLU).
- (3) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0,00% (nol persen) atas jenis PNBPN dari Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, f, g, dan h dapat dikenakan terhadap:
 - a. penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian;
 - b. kondisi kahar;
 - c. kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah; atau
 - d. masyarakat tidak mampu.

- (4) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis PNBP dari Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dikenakan terhadap:
 - a. Mahasiswa Berprestasi Non Akademik;
 - b. Mahasiswa Kurang Mampu; atau
 - c. Mahasiswa Yang Terkena Bencana.
- (5) Kondisi kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam status keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana.
- (6) Kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan berdasarkan kontribusi yang disepakati antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan instansi pemerintah dan telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 6

- (1) Tarif 50% (lima puluh persen) atas jenis PNBP dari Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) poin a dikenakan terhadap Kegiatan Keagamaan.
- (2) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat sementara dan tidak komersial.
- (3) Tarif 50% (lima puluh persen) atas jenis PNBP dari Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) poin b dan c dikenakan terhadap Pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (4) Tarif 50% (lima puluh persen) atas jenis PNBP dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dikenakan terhadap Mahasiswa Berprestasi Akademik.

BAB IV
TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN NOL
RUPIAH ATAU NOL PERSEN ATAS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) poin a, b dan c diberikan berdasarkan permohonan yang disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. program kerja Kementerian untuk permohonan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. rencana pelaksanaan kegiatan keagamaan, untuk permohonan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); atau
 - c. sertifikat/surat keterangan nilai Tingat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk permohonan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (4) Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengenaan tarif PNBP dengan pertimbangan tertentu berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) Alur proses evaluasi, dan persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 8

- (1) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan cara mahasiswa mengajukan permohonan kepada pimpinan Instansi Pemungut PNBП/Instansi Pengelola PNBП.
- (2) Pengenaan tarif PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang melalui pengajuan kembali kepada Pimpinan Instansi Pemungut PNBП/Instansi Pengelola PNBП.
- (3) Tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Instansi Pemungut PNBП/Instansi Pengelola PNBП yang dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan oleh Instansi Pemungut PNBП/Instansi Pengelola PNBП;
 - b. penentuan mahasiswa yang dikenai tarif PNBП berdasarkan hasil verifikasi oleh tim verifikasi;
 - c. Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Ketua Instansi Pemungut PNBП/Instansi Pengelola PNBП; dan
 - d. Mahasiswa Berprestasi, Mahasiswa Kurang Mampu, atau Mahasiswa yang Terkena Bencana, yang mendapatkan pengenaan tarif PNBП sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Instansi Pemungut PNBП/Instansi Pengelola PNBП.
- (4) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengenaan tarif PNBП sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. berstatus aktif pada semester sebelum pengajuan;
 - b. tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dan/atau mendapat bantuan pendidikan dalam bentuk pembayaran SPP Tetap dan SPP Variabel dari lembaga lain;
 - c. tidak sedang mendapatkan sanksi akademik; dan
 - d. memiliki tanda pengenal atau dokumen kependudukan.

- (5) Persyaratan Pengenaan tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4):
- a. Untuk Mahasiswa Berprestasi non Akademik:
 1. telah menyelesaikan paling sedikit 2 (dua) semester;
 2. mempunyai prestasi di luar kegiatan akademik pada bidang teknologi informasi dan komunikasi, seni, olahraga, atau bidang lainnya yang terkait bidang studi dengan peringkat 3 (tiga) besar di tingkat nasional, dan/atau internasional; dan
 3. tidak memiliki tunggakan biaya pendidikan.
 - b. Untuk Mahasiswa Kurang Mampu:
 1. telah menyelesaikan paling sedikit 2 (dua) semester; dan
 2. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 3. melampirkan dokumen keterangan tidak mampu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Untuk Mahasiswa yang terkena bencana, memiliki surat keterangan terkena Bencana dari pemerintah setempat berdasarkan domisili pihak yang membiayai Mahasiswa tersebut.
- (6) Persyaratan pengenaan tarif PNBP sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Untuk Mahasiswa Berprestasi Akademik:
1. telah menyelesaikan paling sedikit 2 (dua) semester; dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol); dan
 2. tidak memiliki tunggakan biaya pendidikan.
- (7) Pelaksanaan verifikasi pemberian tarif Rp0,00 atau 0% diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pemungut PNBP/Instansi Pengelola PNBP.

Pasal 9

- (1) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, f, g, dan h dilaksanakan dengan cara pengajuan permohonan kepada pimpinan Instansi Pemungut PNBP/Instansi Pengelola PNBP.

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Pimpinan atau pejabat yang diberikan kewenangan di dalam Kementerian;
 - b. Pimpinan/kepala/ketua komunitas atau pejabat yang diberikan kewenangan; atau
 - c. Wajib Bayar.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dilengkapi dengan surat tugas peserta dan formulir pendaftaran data diri peserta yang disediakan oleh Instansi Pemungut PNBPN/Instansi Pengelola PNBPN.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilengkapi dengan formulir pendaftaran data diri peserta yang disediakan oleh Instansi Pemungut PNBPN/Instansi Pengelola PNBPN.
- (5) Tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan pelatihan fungsional, pelatihan, atau uji kompetensi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan satuan kerja/ kepala/ ketua komunitas/ pejabat/ Wajib Bayar mengajukan surat permohonan kepada pimpinan Instansi Pemungut PNBPN/Instansi Pengelola PNBPN dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau (4);
 - b. Penentuan pemberian tarif berdasarkan hasil verifikasi oleh tim verifikasi; dan
 - c. Berdasarkan hasil verifikasi, pimpinan satuan kerja penyelenggara kegiatan menetapkan pengenaan tarif PNBPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada para peserta.
- (6) Tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penggunaan sarana prasarana diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan satuan kerja atau pejabat yang diberikan kewenangan di dalam Kementerian mengajukan surat permohonan kepada pimpinan Instansi Pemungut PNBPN/Instansi Pengelola PNBPN ;

- b. Pertimbangan penentuan pemberian tarif berdasarkan ketersediaan dan jadwal penggunaan sarana prasarana yang dimiliki Instansi Pemungut PNBP/Instansi Pengelola PNBP; dan
 - c. Berdasarkan hasil pertimbangan pada huruf b, pimpinan Instansi Pemungut PNBP/Instansi Pengelola PNBP menetapkan pengenaan tarif PNBP.
- (7) Pelaksanaan verifikasi pemberian tarif Rp0,00 atau 0% diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pemungut PNBP/Instansi Pengelola PNBP.

Pasal 10

- (1) Pemberian pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dikenakan dengan mempertimbangkan ketercapaian target PNBP pada masing-masing Instansi Pemungut PNBP/Instansi Pengelola PNBP.
- (2) Pemberian pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dilaporkan kepada Sekretariat Jenderal c.q Biro Keuangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (nol rupiah) dan 50% (lima puluh perseratus) dari Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekolah Tinggi Multi Media dan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Cikarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI ARIE SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...